

Jurnal Pustaka Ilmiah

Jurnal Ilmiah UPT Perpustakaan UNS

SUSUNAN REDAKSI JURNAL PUSTAKA ILMIAH UPT PERPUSTAKAAN UNS

Penanggung Jawab	: Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum.
Ketua Redaksi	: Dra. Tri Hardiningtyas, M.Si.
Wakil Redaksi	: Haryanto, M.IP.
Sekretaris	: Bambang Hermanto, S.Pd., M.IP., Henny Perwitosari, A.Md.
Penyunting Ahli	: 1. Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum. (Universitas Sebelas Maret); 2. Drs. Widodo, M.Soc.Sc. (Universitas Sebelas Maret); 3. Drs. Harmawan, M.Lib. (Universitas Sebelas Maret).
Penyunting	: Daryono, S.Sos., M.IP.; Riah Wiratningsih, S.S., M.Si., Dinar Puspita Dewi, S.Sos., M.IP.; Sri Utari, S.E.
Bendahara	: Nurul H., A. Md.; Novi Tri Astuti, A.Md.
Sirkulasi	: Aji Hartono, A. Md.; Agus Sriyono, A.Md.; Aris Suprihadi, S.IP.

**DITERBITKAN OLEH
UPT PERPUSTAKAAN UNS**

REDAKSI JURNAL PUSTAKA ILMIAH
Alamat: Jl. Ir. Sutami 36A Ketingan, Surakarta 57126
Telp./Fax.: (0271) 654311; email: jurnal.pustaka.ilmiah@gmail.com

PENGANTAR REDAKSI

Salam Pustaka.

Dengan mengucap rasa syukur Allah SWT. segenap Tim Redaksi Jurnal Pustaka Ilmiah (JPI) mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis yang telah berkontribusi untuk penerbitan JPI volume 4 edisi Juni 2018. Penerbitan volume 4 edisi Juni 2018 kali ini JPI mengetengahkan tema: ***Fenomena Media Sosial***. Kehadiran JPI diharapkan dapat dijadikan sebagai media penulisan bagi para pustakawan, dosen, tenaga kependidikan, guru, dan praktisi untuk menuangkan ide dan gagasan kreatifnya secara tertulis.

Dalam penerbitan JPI volume 4 edisi Juni 2018 ini disajikan sepuluh tulisan antara lain: (1) Analisis Keterkaitan Antara Agama Dan Budaya Pada Masyarakat Virtual Di Indonesia (*Ade Yul Pascasari Katili*), (2) “Kodifikasi Agama Melalui Iklan Televisi (Studi Kasus Iklan Televisi Berlabel Halal)” (*Agustian Bhaskoro Abimana Aryasatya*), (3) “Identitas Diri dalam Politik masyarakat Virtual : Sebuah Tinjauan Tentang Anonimitas (*Dwi Cahyo Prasetyo*), (4) Ria SW dan Arief Muhammad : Vlog Sebagai Medium Diseminasi Informasi dan Kreativitas (*Fitri Kartika Sari*), (5) Instagram Sebagai Media Social Movement (studi kasus @merawatjogja) (*Hafidzatul Wahidah*), (6) Komodifikasi Budaya Islam Dalam Masyarakat Virtual : Fenomena Hijabers” (*Hilda Syaf’aini Harefa*), (7) Mengkomunikasikan secara Kreatif Kebijakan dan Layanan Perpustakaan Melalui Media Sosial (*Isrowiyanti*), (8) E-Resources Sebagai Penyedia Informasi Murah Dan Berkualitas (studi kasus Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) (*Lisa Noviani Maghfiroh*), (9) Fenomena Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram (*Nurrahma Yanti*), (10) Perilaku Demokratik Masyarakat Virtual (studi kasus pemustaka Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)” (*Shinta Nofita Sari*).

Akhirnya, redaksi JPI mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala UPT Perpustakaan UNS yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi untuk penerbitan JPI. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para penulis, Tim Redaksi, dan Yuma Pressindo, yang telah mempersiapkan dari awal sampai terbitnya JPI. Selamat membaca...

Surakarta, Juni 2018
Tim Redaksi

SAMBUTAN

Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum.
Kepala UPT Perpustakaan UNS

Selamat dan sukses atas diterbitkannya kembali Jurnal Pustaka Ilmiah (JPI). Jurnal ini sebagai media kreativitas dan pengembangan *softs skills* para pustakawan, guru, dosen, dan praktisi untuk menuangkan ide dan gagasan demi layanan perpustakaan yang prima dan unggul. Berbagai isu terkait dengan pengembangan perpustakaan, pelayanan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, pendidikan, penelitian, pelestarian, dan budaya literasi akan menjadi topik-topik yang disajikan dalam jurnal ilmiah ini.

Diterbitkannya JPI sebagai bukti kepedulian UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dalam rangka turut berpartisipasi mengembangkan dan membudayakan literasi untuk para pustakawan dan civitas akademika di UNS maupun luar UNS. Berbagai model pengembangan *softs skills* menjadi alternatif untuk membekali dan memperkuat jaringan kerja sama penulisan antar kelembagaan. Dengan demikian, kerja sama antar pustakawan dan pemustaka dapat diwujudkan dengan berbagai model dalam bidang literasi.

Penerbitan JPI merupakan sarana untuk memotivasi semua pustakawan agar berkarya di bidang penulisan, baik ilmiah maupun nonilmiah. Para pustakawan harus menjadi pionir dalam bidang penulisan. Hal ini sebagai bentuk kepedulian dan keteladanan para pustakawan yang memroses, menyajikan, dan menikmati bahan-bahan pustaka cetak dan noncetak di perpustakaan. Ketersediaan bahan pustaka akan menjadi bahan paling nyata untuk dikembangkan dalam berbagai model perwujudan teknik penulisan. Hal terpenting yang harus dimiliki oleh para pustakawan adalah semangat untuk berbagai pengetahuan melalui tulisan.

Kepedulian setiap sumber daya manusia kepada kelembagaan dapat dituangkan dalam berbagai model pengabdian, salah satunya adalah melalui tulisan. Berbagai ide dan gagasan dapat direalisasikan dengan berbagai model bentuk artikel jurnal, buku, modul, monograf, dan lain sebagainya. Para civitas akademika, guru, pustakawan, praktisi harus memiliki keterampilan menulis sebagai bentuk perwujudan pengembangan diri secara berkelanjutan. Berbagai tulisan dan referensi sudah disajikan tetapi masih sangat minim untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Banyak orang pandai dalam berbicara tetapi masih sedikit yang menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan.

Akhirnya, keluarga besar UPT Perpustakaan UNS mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor, Wakil Rektor, pengelola JPI, penulis, dan semua pihak yang telah mendukung penerbitan JPI. Semoga dengan diterbitkannya JPI ini dapat menjadi media untuk menulis para pustakawan, dosen, guru, dan praktisi dalam bidang iptek dan seni. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada percetakan Yuma Pressindo yang telah membantu mempersiapkan dari awal sampai terbitnya JPI ini. Akhirnya, semoga JPI dapat memberikan nilai kemaslahatan untuk umat.

Surakarta, Juni 2018

DAFTAR ISI

JURNAL PUSTAKA ILMIAH EDISI KEEMPAT: VOLUME 4 NOMOR 1/ JUNI 2018

Tema: Fenomena Media Sosial

Analisis Keterkaitan Antara Agama dan Budaya pada Masyarakat Virtual Di Indonesia <i>Ade Yul Pascasari Katili</i>	507-514
Komodifikasi Agama Melalui Iklan Televisi (Studi Kasus Iklan Televisi Berlabel Halal) <i>Agustian Bhaskoro Abimana Aryasatya</i>	515-523
Identitas Diri dalam Politik Masyarakat Virtual: Sebuah Tinjauan Tentang Anonimitas <i>Dwi Cahyo Prasetyo</i>	524-531
Ria Sw dan Arief Muhammad : Vlog Sebagai Medium Diseminasi Informasi Dan Kreativitas <i>Fitri Kartika Sari</i>	532-539
Instagram Sebagai media <i>social Movement</i> (Studi Kasus @Merawatjogja) <i>Hafidzatul Wahidah</i>	540-548
Komodifikasi Budaya Islam dalam Masyarakat Virtual : Fenomena Hijabers <i>Hilda Syaf'aini Harefa</i>	549-557
Mengkomunikasikan Secara Kreatif Kebijakan dan Layanan Perpustakaan Melalui Media Sosial <i>Isrowiyanti</i>	558-565
<i>E-Resources</i> sebagai Penyedia Informasi Murah dan Berkualitas (Studi Kasus Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) <i>Lisa Noviani Maghfiroh</i>	566-574
Fenomena <i>Cyberbullying</i> pada Media Sosial Instagram <i>Nurrahma Yanti</i>	575-581
Perilaku Demokratik Masyarakat Virtual (Studi Kasus: Pemustaka Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) <i>Shinta Nofita Sari</i>	582-590

IDENTITAS DIRI DALAM POLITIK MASYARAKAT VIRTUAL: SEBUAH TINJAUAN TENTANG ANONIMITAS

Dwi Cahyo Prasetyo

ABSTRACT

This article aims to examine the interrelationships between politics that exist in virtual society, and their relationship with self-identity reflected in current anonymity on social media. This article uses qualitative research methods, through existing observation and literature studies. Technological advances form a new world called the virtual world. The concept of identity in virtual society is a difference of opinion between destitopians, neofuturists and technicians. The presence of this virtual world makes people free to become anonymous or people without identity. In the political contestation of anonymity can give the public the freedom to argue, while on the other hand anonymity can have a negative impact which can lead to conflict.

Keywords: *Anonymity, Virtual Society, politics*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk meneliti keterkaitan antara politik yang ada dalam masyarakat virtual, dan hubungannya dengan identitas diri yang tercermin dalam anonimitas di sosial media saat ini. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui observasi dan studi pustaka yang ada. Kemajuan teknologi membentuk satu dunia yang baru yang disebut dengan dunia virtual. Konsep identitas dalam masyarakat virtual menjadi perbedaan pendapat antara destitopian, neofuturis maupun teknorealis. Kehadiran dunia virtual ini membuat masyarakat bebas untuk menjadi anonim atau masyarakat tanpa identitas. Dalam kontestasi politik anonimitas dapat memberikan masyarakat kebebasan untuk berpendapat, sementara disisi lain anonimitas dapat berdampak negatif dapat menimbulkan konflik.

Kata Kunci: Anonimitas, Masyarakat Virtual, politik

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan politik di Indonesia, sosial media menjadi salah satu cara penyampaian pendapat maupun kritik yang paling efektif. Kehadiran media sosial emberikan kesempatan kepada setiap pengguna untuk ikut berkontribusi menyebarkan secara langsung informasi, ide, minat karir maupun beragam ekspresi lainnya kepada pengguna lain melalui beragam platform. Indonesia saat ini merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbesar dengan berada di peringkat ke 5 pengguna internet terbesar di dunia dengan jumlah pengguna lebih dari 132 juta pengguna atau lebih dari 50% dari seluruh populasi masyarakatnya. Menurut survei yang dilakukan

oleh APJII – Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia tahun 2016, sebanyak 97,4% atau 129,2 juta dari keseluruhan pengakses internet di Indonesia digunakan untuk mengakses media sosial. Interaksi -interaksi yang terjalin di dalam sosial media membentuk satu dunia yang berbeda dengan dunia nyata, yang disebut dengan dunia virtual.

Dunia virtual selanjutnya membentuk suatu realitas baru yang berupa hiperealitas, di mana manusia saat ini telah melampaui realitas itu sendiri dalam melakukan penjelajahan global. Hiperealitas ini yang kemudian secara sistematis membentuk apa yang dinamakan sebagai *cyberspace* atau ruang siber. Thomas Ploug menjelaskan bahwa *cyberspace* adalah

lokasi virtual, kamar atau ruang yang dapat diakses melalui jaringan komputer yang saling terhubung secara berkelanjutan. Dunia yang baru ini hadir karena selalu terhubungnya manusia dengan manusia lain secara terus menerus, tanpa harus bertemu secara fisik.

Ruang-ruang yang tercipta karena *cyberspace* inilah yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjadi sesuatu yang anonim. Anonim atau *anonymous* adalah satu kondisi di mana identitas seseorang menjadi hilang. Secara harfiah, *anonymous* berasal dari kata *anonymia* dalam bahasa Yunani yang berarti *nameless* atau tanpa identitas. Kondisi ini yang membuat ruang-ruang diskursif di media digital menjadi lebih gaduh dan variatif.

Anonimitas adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dalam praktik penyampaian pendapat secara bebas. Di Amerika, anonimitas dijamin dalam First Amandemen yang memberikan aturan akan kebebasan berpendapat disana. Menurut European Court of Human Rights (ECHR) menjelaskan bahwa anonimitas adalah faktor yang memberikan kesempatan setiap orang untuk berekspresi. Sehingga dapat kita pahami bahwa adanya anonimitas juga memiliki dampak terhadap kebebasan berpendapat setiap warga dan menunjukkan adanya relasi kuasa antara negara dan masyarakat. Dari Sini penulis mencoba untuk meneliti keterkaitan antara politik yang ada dalam masyarakat virtual, dan hubungannya dengan identitas diri yang tercermin dalam anonimitas di sosial media saat ini.

PEMBAHASAN

Masyarakat Virtual dan Relasi Kuasa

Kata virtual menurut KBBI dapat berarti: (secara) nyata; mirip atau sangat mirip dengan sesuatu yang dijelaskan; tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya di internet. Secara harfiah kata virtual dapat disamakan dengan maya, atau tidak nyata. Virtual digambarkan sebagai

sesuatu kondisi yang tidak benar-benar ada, tapi dapat terlihat kehadirannya. Virtual dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada, tapi tidak benar-benar nyata di mana kehadirannya harus melalui perantara software dan hardware.

Dunia virtual sering digambarkan sebagai lawan atau sisi yang berlawanan dengan dunia nyata atau realita saat ini. Menurut Mark W. Bell, dunia virtual adalah jaringan yang tersinkronisasi, dipresentasikan sebagai *avatar* dan difasilitasi oleh jaringan komputer. Hal senada juga disampaikan oleh Aichner dan Jacob bahwa dunia virtual adalah sebuah dunia yang dipenuhi oleh banyak pengguna yang dapat membuat avatar pribadi, dan secara bersamaan secara bebas menjelajahi dunia maya, di mana mereka dapat berpartisipasi dan berkomunikasi dengan orang lain secara real time. Dunia Virtual dianggap sebagai suatu lingkungan yang terus-menerus, bersimulasi dan imersif, difasilitasi oleh jaringan komputer, menyediakan banyak pengguna dengan avatar dan alat komunikasi yang dapat digunakan secara real-time untuk bertindak dan berinteraksi.

Penjelasan di atas memberikan petunjuk bahwa masyarakat yang ada di dunia virtual dapat saling terhubung dan berkomunikasi antara satu dan lainnya seperti halnya yang terjadi di dunia nyata. Namun tetap membutuhkan suatu komponen inti yang disebut dengan jaringan komputer atau internet. Jaringan ini yang saling menghubungkan antar satu orang dengan orang lain untuk saling menyampaikan pendapat, gagasan dan impian secara *real-time*.

Namun kemudian menjadi pertanyaan bagaimana dengan kekuasaan pemerintah jika memahami informasi sebagai sebuah kekuatan (*power*), sedangkan saat ini informasi sudah terdesentralisasi. June Lester dkk, mencantumkan dua pendapat dalam bukunya *Fundamentals of Information Studies* untuk memahami tentang kekuasaan dalam masyarakat informasi, yang pertama adalah totalitarian menurut Hannah Arendt, dan yang kedua

demokratis menurut Alexis de Tocqueville. Menurut pendapat Arendt, kekuasaan totalitarian cenderung menggunakan teror untuk mendapatkan tujuan politiknya. Dalam upayanya untuk mempertahankan kekuasaan, totalitarianisme akan mengontrol informasi secara terpusat dimana aktor yang berkuasa akan berusaha semaksimal mungkin untuk menguasai pemikiran aktor yang dikuasainya. Sedangkan pendekatan demokratis menurut Alexis de Tocqueville berpendapat bahwa semakin banyak saluran informasi dan beragam institusi informasi justru akan semakin melindungi demokrasi dan mencegah kepemimpinan tirani.

Kekuasaan totalitarianisme saat ini dapat kita lihat pada negara Korea Utara. Seperti yang digambarkan oleh Glyn Ford dan Soyong Kwon dalam bukunya *North Korea on the Brink: Struggle for Survival* di Korea Utara, jika tidak memiliki akses dengan petinggi partai atau pejabat militer tidak akan ada akses informasi selain yang disebar oleh pemerintah. Selain itu media, buku dan internet semua hanya tersedia yang resmi dari pemerintah. Setiap perlawanan yang dilakukan masyarakat, akan ditindak sebagai pengkhianatan dan musuh negara sehingga dapat dihukum mati di tempat umum. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Arendt tentang totalitarianisme. Sekilas hal ini membuat negara Korea Utara seakan terlihat sangat teratur dan tentram. Namun di sisi lain kekuasaan absolut telah membawa masyarakat Korea Utara hidup dalam bayang-bayang teror penguasanya sendiri. Meskipun demikian hal ini tidak menghalangi masuknya beragam informasi dari 'barat' secara ilegal hasil impor melalui tetangga terdekat mereka, yaitu China.

Sedangkan yang sesuai dengan pendekatan demokratis adalah Amerika Serikat tentunya. Dalam tatanan demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Amerika memiliki banyak media massa yang memberikan opini terhadap pemerintahnya. Meskipun kemudian hal ini

menimbulkan kesan media-media tersebut bias atau memiliki kecenderungan untuk mendukung pihak tertentu. Namun jika menilik apa yang disebutkan Alexis de Tocqueville, banyaknya media ini membuat kekuasaan absolut tidak dapat berkembang. Karena setiap informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, berpotensi untuk dibantah oleh media lainnya. Sehingga yang terjadi adalah keseimbangan informasi, meskipun hal ini menuntut kemampuan masyarakatnya untuk memiliki kemampuan literasi media yang baik.

Dari pemaparan di atas, kita dapat memahami bahwa sejatinya informasi yang absolut tergantung pola kepemimpinan yang ada pada masyarakat tersebut. Jika kepemimpinan menggunakan pola totalitarianisme, maka informasi yang ada cenderung absolut. Meskipun demikian, kehadiran informasi tidak dapat dibendung secara penuh. Dalam pola totalitarian pun akan selalu ada celah untuk masuknya penetrasi informasi. Sedangkan pada sisi lain, dalam pola demokrasi. Informasi akan diberikan sebesar-besarnya kepada masyarakat, meskipun terdapat beberapa yang tetap disimpan jika terkait privasi atau keamanan bersama. Namun kehadiran banyaknya saluran informasi, akan memberikan keseimbangan sehingga informasi yang absolut tidak akan berkembang.

Menurut Manuel Castells dalam bukunya *Communication Power* menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan relasional yang memungkinkan seorang aktor sosial untuk mempengaruhi secara asimetris keputusan aktor sosial lainnya, dengan cara yang mendukung kemauan, kepentingan, dan nilai dari aktor yang diberdayakan tersebut. Castells menekankan sebuah kapasitas relasional yang berarti bahwa kekuasaan bukan sekedar atribut melainkan sebuah hubungan.

Selama hubungan tersebut berjalan dengan baik, maka kekuasaan yang dimiliki juga dapat dikatakan baik. Jika diibaratkan bahwa

informasi (information) = kekuasaan (power), maka dapat dipahami bahwa semakin besar kekuasaan satu aktor dalam masyarakat yang memiliki kuasa untuk memerintah, semakin besar pula ia dapat menguasai informasi. Namun hal ini tergantung hubungan (relasi) antara satu aktor yang berkuasa dan aktor yang diperintah. Hal ini senada dengan yang diterangkan oleh June Lester dkk yang mengatakan bahwa kepercayaan (*trust*) merupakan komponen penting dalam informasi dan kekuasaan. Sehingga dapat kita pahami bahwa yang terpenting dalam penguasaan informasi adalah untuk menjaga hubungan (*relasi*) antara aktor dalam satu masyarakat dan kepercayaan (*trust*) yang merupakan penghubungnya.

Disisi yang lain seorang pemikir asal Perancis, Michel Foucault menolak pendapat bahwa kekuasaan tidak hanya tergambar dalam relasi antara negara – masyarakat namun kekuasaan dapat berada dalam konteks yang lebih kecil dari itu. Kuasa itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara berbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan di sana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi. Sehingga dapat kita gambarkan bahwa kekuasaan tak selamanya dari atas ke bawah, akan tetapi kekuasaan dapat mengarah ke segala arah. Hal ini yang disebut oleh Michel Foucault sebagai *'the microphysics of power'*

Dalam penggambaran kontemporer, maka kekuasaan ini terlihat dalam media sosial saat ini. Komunikasi yang terjadi di sosial media memungkinkan setiap orang menunjukkan kuasa atas pendapatnya kepada siapapun. Hal ini dapat berdampak positif, akan tetapi juga bisa berdampak negatif ketika pendapat yang

berbeda dapat memicu konflik. Namun juga jika merujuk ke teori yang disampaikan oleh Michel Foucault, negara tetap akan memantau setiap pergerakan masyarakatnya dengan konsep panoptisnya. Oleh karena itu banyak yang merasa lebih aman saat menyampaikan pendapat dengan cara menjadi anonim atau yang tidak memiliki nama, agar dirinya tidak terlacak, tidak tercatat secara langsung sehingga ia merasa bebas untuk menyampaikan pendapat.

Identitas dan Anonimitas pada Masyarakat Virtual

Menurut Slouka seorang novelis dan kritikus budaya asal Amerika menyatakan bahwa kehadiran teknologi informasi dan internet telah menyentuh ke aspek dasar kehidupan manusia, yaitu ruang, Identitas, komunitas dan realitas manusia. Aspek-aspek yang disampaikan oleh Slouka inilah yang kemudian dapat dijadikan ukuran dalam menilai masa depan antara manusia dan teknologi. Aspek-aspek tersebut membentuk tiga pandangan terhadap teknologi Neofuturis, Destopian dan Teknorealis.

Dalam sudut pandang neofuturis, teknologi adalah harapan untuk masa depan yang lebih baik dari umat manusia. Neofuturis memandang Identitas sebagai sesuatu yang dapat berlipat ganda, teknologi memberikan ruang kepada manusia untuk kreatif dan menjadi dirinya yang lain. Namun disisi lain sudut pandang destopian adalah sisi yang berlawanan dari neofuturis. Dalam sudut pandang destopian kehadiran teknologi justru akan mereduksi nilai-nilai dan Identitas masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah menjadi anonim, dimana nilai-nilai kemanusiaan perlahan-lahan akan berkurang. Sementara itu, dalam sudut pandang teknorealis, Identitas dianggap sebagai sesuatu yang permisif, dimana setiap orang sejatinya memiliki peran masing-masing layaknya di dalam drama.

Anonim atau *anonymous* adalah satu kondisi di mana identitas seseorang menjadi

hilang. Secara harfiah, *anonymous* berasal dari kata *anonymia* dalam bahasa Yunani yang berarti *nameless* atau tanpa identitas. Banyak yang menganggap anonimitas tercipta karena peran dari karakteristik yang dimiliki oleh media digital itu sendiri. Hal ini disebut oleh Marjorie Ferguson sebagai suatu mitologi globalisasi. Menurut Ferguson mitologi dalam media sosial adalah hilangnya konsep-konsep tentang ruang dan waktu sebagai akibat dari hadirnya listrik dan beragam media elektronik yang menghubungkan dunia. Saat ruang dan waktu bukan lagi sesuatu yang primer, maka setiap orang dapat saling terkoneksi dan membentuk satu jaringan dalam ruang yang baru yaitu dunia virtual.

Media sebagai perantara menunjukkan bagaimana saat ini hubungan antara komunikator dan komunikan tidak perlu dilakukan secara *face to face* atau langsung sehingga tubuh tidak lagi komponen utama dalam komunikasi. Jadi siapapun dengan beragam latar belakang dan karakter fisiknya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berkomunikasi. Selain itu, pergeseran makna yang terjadi akibat hadirnya media-media baru seperti sosial media juga memberikan makna lain tentang media itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Martin Lister dalam bukunya *New Media: A Critical Introduction* sebagai berikut:

“the ‘new’ is ‘the cutting-edge’, ‘the avant-garde’, the place for forward-thinking people to be (whether they be producers, consumers, or, indeed, media academics).”

Dapat kita pahami bahwa kehadiran media-media baru telah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjadi konsumen sekaligus dapat secara bersamaan ia menjadi produsen konten. Sebelumnya komunikasi media masa yang hanya terjadi satu arah, kini telah berubah. Setiap orang dapat menjadi konsumen sekaligus produsen informasi yang ada dalam frame informasi di dunia virtual.

Virtualitas media inilah yang kemudian memberikan kesempatan untuk munculnya anonymity yang dapat digunakan dalam motif positif maupun negatif oleh setiap orang.

Kehadiran dunia virtual, semua orang dapat menyampaikan ekspresinya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Seperti yang tercantum dalam manifesto yang dikeluarkan sebuah lembaga hak asasi manusia di Inggris, Article 19 yang menjelaskan bahwa anonimitas merupakan sebuah kunci konsep perlindungan kebebasan berekspresi dan hak untuk mendapatkan privatisasi. Tidak hanya sekedar untuk memberikan perlindungan kebebasan setiap individu untuk berkomunikasi dan menyampaikan gagasan, tetapi juga melindungi setiap individu untuk bebas menjalani hidup tanpa melalui pemeriksaan yang tidak perlu.

Kehadiran konsep anonimitas akibat hadirnya komunikasi di dunia virtual juga membawa motif-motif yang dilakukan oleh setiap penggunanya. Dua konsep motif yang terdapat dalam anonimitas adalah motif positif dan motif negatif. Menurut Arina Rohmatul Hidayah bahwa motif positif dari anonimitas adalah membawa dampak positif dalam hal privasi dan keterbukaan diri (*self disclosure*) jika dilihat dari kacamata *hyperpersonal communication*. Terdapat sebagian orang yang merasa ia lebih terlindungi dan tidak merasa terancam atau mendapat perlakuan diskriminatif ketika ia terbuka terhadap orang lain. Namun disisi lain, kehadiran anonimitas juga memiliki motif negatif, dimana berkurangnya moralitas sosial. Ketika berada dalam akun anonim, setiap orang bebas melakukan berbagai hal tanpa melihat efek yang terjadi baik maupun buruk.

Dampak lain dari anonimitas dalam politik di sosial media adalah munculnya konflik-konflik atas kontestasi politik yang ada. Pada masyarakat virtual, hubungan antara pemerintah yang berkuasa dan masyarakatnya menjadi lebih intim dengan hadirnya media sosial sebagai sarana penyampaian pendapat. Lambat laun hal ini mengubah media sosial

dari platform untuk berinteraksi antar pengguna menjadi medan konflik politik di masyarakat. Konflik-konflik ini tak jarang dimulai melalui akun-akun anonim.

Pada ranah media sosial, menajamnya konflik tergambar melalui twitter misalnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hasf, dkk menggambarkan bagaimana akun-akun anonim memiliki peran besar dalam konstelasi politik masyarakat Indonesia di sosial media. Dalam penelitian yang dirilis tahun 2017 tersebut meneliti tiga akun sosial media yang ada di twitter, yaitu: @PartaiSocmed, @pkspiyungan dan @TrioMacan2000 dalam rangka Pemilu Presiden 2014.

Ketiga akun twitter tersebut mencoba untuk memberikan pengaruh di media sosial dengan mengangkat isu-isu seperti identitas, dukungan kelompok agama, hak asasi manusia, korupsi, kepemimpinan, ideologi hingga tampilan fisik. Dari penelitian tersebut mendapat kesimpulan bagaimana akun-akun anonim yang ada membawa sosial media dari medium untuk berekspresi secara bebas, namun berubah menjadi medium para elite untuk mendapatkan kekuasaan. Bahkan perbincangan yang dilakukan oleh akun-akun anonim di twitter dalam kontestasi politik tahun 2014 lebih cenderung mereduksi proses demokrasi.

Konflik ini juga terjadi di ranah media sosial, tidak jarang terjadi diskusi, perdebatan hingga ujaran-ujaran kebencian antar pengguna media sosial. Terlebih lagi ditambah dengan sebagian orang yang memanfaatkan hal ini untuk menyebarkan berita *Hoaks* dan *fake news*, kemudian diperparah oleh berita-berita *online* yang lebih mengutamakan *clickbait* dengan *headline* berita yang hanya ditujukan untuk menarik traffic pengguna berkunjung ke domain kantor berita online mereka. Hal ini membuat sosial media menjadi medan pertempuran pendapat yang sangat crowded, yang bisa saja berujung kepada tindakan-tindakan kekerasan yang tidak sejalan dengan demokrasi.

Jika kita menilik pendapat yang dikemukakan oleh Lewis A Coser seorang sosiolog Amerika yang mendalami tentang teori konflik, dalam tulisannya *Social Conflict and the Theory of Social Change*. Coser menjelaskan terdapat beberapa fungsi konflik, salah satunya adalah konflik dapat menghasilkan solidaritas di dalam kelompok yang bisa menghantarkan aliansi-aliansi dengan kelompok lain. Solidaritas internal kelompok bisa dipahami dengan sederhana, anggota kelompok merasa dekat tidak hanya karena suatu kesamaan sudut pandang, tetapi juga karena ada sesuatu yang dianggap sebagai musuh bersama. Dalam sosial media twitter menjadi contoh, orang-orang yang memiliki dukungan atau pandangan terhadap suatu sisi akan cenderung untuk mengikuti atau mem-*follow*, atau hanya sekedar me-*retweet* darii akun yang memiliki pandangan yang sama dengan dirinya.

Pesatnya perkembangan informasi dan konflik-konflik yang melibatkan sudut pandang asosiatif ini kemudian dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita bohong atau Hoax. Hoax adalah berita atau informasi palsu yang secara sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyamar sebagai sebuah kebenaran. Meskipun beragam informasi hoax sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, namun cepatnya informasi di media sosial pada sekarang membuat beragam hoax di media sosial pun tumbuh subur ditambah lagi tendensi dari pengguna baik dari sisi politik, agama, ekonomi maupun pandangan lainnya.

KESIMPULAN

Penjelasan di atas memberikan petunjuk bahwa masyarakat yang ada di dunia virtual dapat saling terhubung dan berkomunikasi antara satu dan lainnya melalui jaringan komputer atau internet. Jaringan ini membentuk satu dunia yang baru yang disebut dengan dunia virtual. Konsep identitas dalam masyarakat virtual menjadi perbedaan pendapat antara destiopian,

neofuturis maupun teknorealis. Kehadiran dunia virtual ini membuat masyarakat bebas untuk menjadi anonim atau masyarakat tanpa identitas. Dalam kontestasi politik anonimitas dapat memberikan masyarakat kebebasan untuk berpendapat, sementara disisi lain anonimitas dapat berdampak negatif dapat menimbulkan konflik-konflik yang semakin meruncing. Oleh karena itu pentingnya kebijaksanaan dalam menggunakan sosial media dan kesadaran akan dampak-dampak buruk yang dihasilkan oleh anonimitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aichner, T. and Jacob, F. (2015). "Measuring the Degree of Corporate Social Media Use". *International Journal of Market Research*. 57 (2)
- APJII, *Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016*. Jakarta: APJII, 2016. 22
- Arina Rohmatul Hidayah, (2018) *Anonymity: Masyarakat Tanpa Identitas (Redefinisi Identitas Diri Di Era Digital)*, dalam Prosiding Graduate Forum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Article 19. (2015). *Right to Online Anonymity*. London: Free Word Centre. Diakses melalui
- Astar Hadi, 2005. *Matinya dunia cyberspace: kritik humanis mark slouka atas jagat maya*. Yogyakarta: LKIS,
- Bell, Mark W. 2008 "Virtual Worlds Research: Past, Present & Future." *Journal of Virtual Worlds Research*.
- Etymonline, Virtual. <https://www.etymonline.com/word/virtual> diakses pada 27/05/2018 pukul 23:19 WIB
- Fitch, Marc E. (2013). "Paranormal Nation: Why America Needs Ghosts, UFOs, and Bigfoot". ABC CLIO, California.
- George Ritzer & Jeffery Stepnisky, (2013) *Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots* ed.4 (New York: McGraw Hill) 239
- Girvan, Carina. 2013. *What is a Virtual World? Definition and Classification* Dublin, Ireland: School of Computer Science and Statistics (SCSS) at Trinity College Dublin.
- Glyn Ford and Soyoung Kwon. 2008. *North Korea on the Brink: Struggle for Survival*. London: Pluto Press.
- Henry Jenkins & David Thorburn, 2003. *Democracy and new media*. Cambridge :The MIT Press https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38006/Anonymity_and_encryption_report_A5_final-web.pdf pada 03/06/18
- Internet World Stats. *Top 20 Countries With The Highest Number Of Internet Users*, diakses dari <http://www.internetworldstats.com/top20.htm> pada 19/12/2017 pukul 14.29
- June Lester, et.all. 2003. *Fundamentals of Information Studies: Understanding Information and Its Environment*. Neal Schuman Publishers.
- Lewis A. Coser, (1957) *Social Conflict and the Theory of Social Change*, *The British Journal of Sociology*, Vol. 8, No. 3.

- M. Chawki. 2006. *Anonymity in Cyberspace: Finding the Balance between Privacy and Security*. Droit-Tic, Juill
- M. Chawki. 2006. *Anonymity in Cyberspace: Finding the Balance between Privacy and Security*. Droit-Tic, Juill:
- MacDougall, . (1958) Curtis D. *Hoaxes*. Dover.
- Manuel Castells, 2009. *Communication Power*. UK: Oxford University Press,
- Marjorie Ferguson. 2005. *The Mythology about Globalization*. Dalam Mc Quail, Denis, et al (Eds.). *Communication Theory & Research*. London: Sage Publications.
- Martin Lister, et al. (2009) *New Media: A Critical Introduction*. New York: Routledge,
- Michel Foucault, 2000. *Seks dan Kekuasaan*, Terj. S. H. Rahayu. Jakarta: Gramedia.
- Nurul Hasf dkk. (2017) *Anonimitas di Media Sosial: Sarana Kebebasan Berekspresi atau Patologi Demokrasi?*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 15, Nomor 1, Januari - April. 28-38
- Obar, Jonathan A.; Wildman, Steve (2015). “*Social media definition and the governance challenge: An introduction to the special issue*”. *Telecommunications policy*. 39 (9)
- Ploug, Thomas. 2009. *Ethics in Cyberspace How Cyberspace May Influence Interpersonal Interaction*. London: Springer.
- Seno Joko Suyono, 2002. *Tubuh Yang Rasis*. Yogyakarta: Pustaka Relajar,.
- Wilhem, Antony G. (2000) *Democracy in the Digital Age: challenges to political life in cyberspace*, (London: Routledge)
- Yaman Akdeniz. 2002. *Anonymity, Democracy, and Cyberspace*. *Social Research*: 69(1).